

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan  
Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur periode 2010-2016**

**JURNAL**



Oleh :

Nama : Dinda Faradilla  
Nomor Mahasiswa : 14313473  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
2017**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Ketika diamati pengaruh variabel tersebut dengan model *fixed effect* dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan kurun waktu 7 tahun (2010-2016) dan terdiri dari 9 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Maka dapat diketahui bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial dapat meningkatkan Pengeluaran Pemerintah melalui belanja langsung dan tidak langsung, tetapi pada variabel Populasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Dan menyebabkan terjadinya *flypaper effect* karena Provinsi Kalimantan Timur masih bergantung pada Dana Perimbangan ( DBH, DAU, DAK ) sebagai sumber pendanaan paling besar dalam menjalankan otonomi daerah nya.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Populasi.*

## PENDAHULUAN

Ditandai dengan usainya masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998, sistem penyelenggaraan negara beralih menggunakan kebijakan *desentralisasi*. Yaitu penyerahan kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus segala bentuk pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk fiskal, politik, administratif dan pasar.

Berdasarkan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga nya. Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk menggunakan segala bentuk sumber daya yang ada di wilayahnya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. UU tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan segala sumber daya nya dalam pembangunan daerahnya dengan dibantu Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan asas yang akan digunakann dalam menjalankan kebijakan desentralisasi tersebut.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi pemerintah daerah diberi wewenang dan kebebasan dalam menentukan kebijakan, mengambil keputusan dan mengelola keuangan mandiri. Mengelola keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan ketiga sumber tersebut dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD.

Di era desentralisasi fiskal sekarang ini diharapkan pemerintah menjalankan fungsinya secara efektif dalam peningkatan pelayanan masyarakat di sektor publik, karena cermin dari daerah dengan pembangunan yang berkembang akan menarik investor dalam negri maupun asing untuk menanamkan investasinya di daerah dan dengan masuknya investor ke suatu daerah akan membuat pembangunan di daerah tersebut tumbuh dan berkembang. Belanja atau pengeluaran pemerintah daerah juga diharapkan tepat sasaran sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat dan daerah tersebut sebagai contoh peningkatan aset tetap seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan lainnya. Dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau belanja modal diharapkan kebutuhan masyarakat dari sektor publik terpenuhi.

Dengan adanya bantuan pendanaan daerah seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi diharapkan mempunyai kontribusi yang besar untuk pembangunan dan peningkatan sektor publik. Dan dari tahun ketahun Provinsi Kalimantan Timur masih menjadikan dana perimbangan sebagai sumber pendanaan bagi daerahnya atau dengan kata lain Provinsi Kalimantan Timur masih berketergantungan tinggi dengan dana perimbangan. Hal ini menjelaskan bahwa tingginya tingkat ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur masih pada dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat.

#### Pengeluaran pemerintah

Tahun	Berau	Kukar	Kubar	Kutim	Paser	Balikpapan	Bontang	Samarinda	Penajam
2010	1455035	484622	1334942	2425908	1086454	1487693	918352	2427411	1171002
2011	1482759	4632244	1510257	2264033	1283270	1791962	1428974	1538067	1453425
2012	1690515	4927563	1653182	2684544	1457228	1823792	1329984	1939556	1510447
2013	2009985	7720443	2216870	3244550	2221901	2513698	1508282	2826746	1661539
2014	2846806	7945179	2900557	3288964	2358578	3003388	1904148	3970029	1795079
2015	3004767	6980098	4262282	3593589	2435295	3139553	1844794	3429625	2062410
2016	2793638	6980371	4181170	3960454	2542198	3112335	1910307	3201521	1493318

Sumber : [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)

Data diatas dapat dilihat pengeluaran pemerintah per tahun di kabupaten/kota provinsi kalimantan timur tahun 2011-2016 setiap tahunnya mengalami peningkatan.

## PENELITIAN TERDAHULU

(Hartanto, 2015) melakukan penelitian tentang pengeluaran pemerintah melalui belanja daerah. Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah penduduk, DBH, DAU, dan DAK terhadap Pengeluaran Pemerintah.

Jenis penelitian ini menggunakan uji signifikansi memakai pendekatan *fixed effect* dan *random effect*, yang bertujuan untuk memilih hasil regresi antara *common effect*, *fixed effect* atau *random effect*. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian model regresi ini adalah data panel yang merupakan gabungan data antara data *time series* dan data *cross section*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DBH, DAU, DAK memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah, Variabel jumlah penduduk bertanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

(Devita, Andri; Delis, Arman; Junaidi, 2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi jambi. Yang menggunakan variabel dependennya pengeluaran pemerintah dan variabel independennya PAD, DAU, dan Penduduk.

Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data dari APBD dan Jumlah Penduduk. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan data antara data *time series* dan data *cross section*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan atau peningkatan belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

(Alodia, Moristha, 2016) melakukan penelitian tentang Analisis alokasi belanja daerah kabupaten/kota di provinsi banten. Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu anggaran yang terdiri dari 3 komponen yaitu penerimaan, belanja rutin, dan belanja pembangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui PAD, DAU dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di provinsi Banten.

Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian model regresi ini adalah data panel yang merupakan gabungan data antara data *time series* dan data *cross section*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Jumlah Penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

(Armawaddin, Muhammad, 2015) menganalisis penelitian tentang Analisis *Flypaper Effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. *Flypaper Effect* terjadi dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat / penduduk mengenai pembelanjaan dan pembiayaan serta keputusan yang diambil sebab akibat dari kesalahan persepsi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui komposisi penggunaan antara PAD dan DAU sebagai sumber belanja kabupaten/kota. .

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris yaitu menjelaskan hubungan kausalitas melalui pengujian hipotesis. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian model regresi ini adalah data panel yang merupakan gabungan data antara data *time series* dan data *cross section*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gejala *Flypaper Effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara karena terjadinya penggunaan dana belanja yang inefisiensi dan pemerintah daerah terlalu menggantungkan transfer pemerintah dalam pembiayaan belanja daerahnya.

## KAJIAN PUSTAKA

### **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah menurut teori Keynes , merupakan unsur dari permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional  $Y = C + I + G + X - M$  atau yang dikenal sebagai rumus pendapatan nasional, dengan variabel Y sebagai penawaran agregat dan variabel C, I, G, X dan M sebagai permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah, dengan membandingkan variabel G terhadap Y dari waktu ke waktu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel G (pengeluaran pemerintah) dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

### **PAD (Pendapatan Asli Daerah)**

Dengan adanya kebijakan desentralisasi pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan UU yang berlaku. Dengan adanya kewenangan tersebut pemerintah daerah berwenang untuk membuat kebijakan guna mensejahterakan rakyatnya. Indikator keberhasilan perkembangan dan pembangunan suatu daerah dilihat dari besar kecilnya anggaran PAD yang terealisasi. Potensi paling besar bersumber dari masyarakat sendiri yaitu dari pajak dan retribusi daerah, sebagian bersumber dari hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain pendapatan yang sah.

### **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah untuk mendanai dan mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi sebagai tujuan membentuk daerah otonom, menurut UU Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana perimbangan dibentuk sebagai suatu dukungan untuk menjalankan program otonomi. Dana perimbangan diberikan kepada daerah untuk meningkatkan sektor publik seperti pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

### **Populasi**

Populasi adalah sekumpulan individu yang hidup di tempat yang sama atau dengan kata lain penduduk, penduduk atau warga merupakan jumlah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Populasi atau penduduk setiap tahun akan bertambah dan mengalami peningkatan, ketika semakin terjadinya penambahan pada populasi maka akan terjadinya

masalah fiskal dalam penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan pelayanan masyarakat lainnya. (Putriani, 2011) menerangkan semakin bertambahnya jumlah penduduk atau populasi akan mendorong peningkatan kebutuhan barang publik disaat meningkatnya kebutuhan barang publik harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik yang harus ditambah oleh pemerintah yang akan menyebabkan kenaikan anggaran pada pengeluaran pemerintah.



## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif ialah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik), dan DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan), data sekunder disini menggunakan metode *panel data* atau data panel yakni gabungan antara data antar tempat atau ruang (*cross section*) dan data antar waktu (*time series*). Data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu dan tempat tertentu dari sampel.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian ini diperoleh dari laporan APBD Kabupate/Kota Provinsi Kalimantan Timur dari web [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id) dan badan pusat statistik kalimantan timur <https://kaltim.bps.go.id> . peneitian ini direncanakan secara bertahap dalam bulan Desember 2017 sampai dengan January 2018.

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan populasi. Sampel total pengeluaran pemerintah kabupaten/kota provinsi kalimantan timur seperti belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam satuan juta rupiah, total pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten/kota provinsi kalimantan timur dalam satuan juta rupiah, total dana perimbangan termasuk dana bagi hasil, dana alokasi umum dan alokasi khusus dalam satuan juta rupiah, dan total jumlah penduduk di kabupaten/kota provinsi kalimantan timur dalam satuan juta jiwa.

### Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel, dan menggunakan *fixed effect* sebagai alat analisisnya. Untuk melihat pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan populasi terhadap pengeluaran pemerintah. Rergresi dengan menggunakan *common effect* dan *random effect* dalam penelitian ini kurang tepat untuk mengestimasi persamaan regresi data panel. Berikut adalah persamaan regresi dalam penelitian ini :

$$\log Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 \log X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

$Y$  = Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur.

$X_{1it}$  = Pengeluaran Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Timur (PAD) tahun  $t$ .

$X_{2it}$  = Dana Perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur tahun  $t$ .

$X_{3it}$  = Populasi atau jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tahun  $t$ .

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$  dan  $\beta_4$  = Koefisien variabel Independen

$\epsilon_{it}$  = *Error term*

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam regresi ini menggunakan uji *common effect, fixed effect* dan *random effect*

Berikut hasil estimasi dari 3 model tersebut :

<i>Independent Variabel</i>	<i>Common Effect Model</i>		<i>Fixed Effect Model</i>		<i>Random Effect Model</i>	
	<i>Coefficient</i>	<i>Probability</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Probability</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Probability</i>
<i>Constant</i>	1516.020	0.9917	3.366613	0.0379	1.536829	0.0207
Log(PAD?)	2.402717	0.0034	0.358968	0.0000	0.190778	0.0002
Log(DP?)	1.274955	0.0000	0.509972	0.0000	0.743679	0.0000
Log(PO?)	0.297694	0.5461	-0.010866	0.9322	0.026853	0.6471
<i>R-squared</i>	0.890427		0.904360		0.864428	
<i>Prob (F-stat)</i>	0.000000*		0.000000*		0.000000*	

Hasil estimasi *Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect*

Note : \* = Signifikan pada tingkat  $\alpha$  1%

Sumber : data diolah dengan e-views 8.

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada model *Common Effect* Variabel PAD dan DANA PERIMBANGAN berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di kabupaten / kota Kal-tim. Dilihat dari nilai probabilitas F-statistik menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel PAD, DANA PERIMBANGAN dan POPULASI berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di kabupaten / kota Kal-tim. Dan untuk nilai *R-squared* didapatkan sebesar 89.04 persen yang berarti bahwa ada perubahan pada variabel pengeluaran pemerintah yang dapat dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel PAD, DANA PERIMBANGAN dan POPULASI selebihnya dijelaskan oleh variabel lain.

Sedangkan untuk model *Fixed Effect* variabel PAD dan DANA PERIMBANGAN berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Dilihat dari nilai probabilitas F-statistik menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel PAD DANA PERIMBANGAN dan POPULASI berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Dan untuk nilai *R-squared* didapatkan sebesar 90.43 persen yang berarti bahwa ada perubahan pada variabel pengeluaran pemerintah yang dapat dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel PAD, DANA PERIMBANGAN dan POPULASI, selebihnya dijelaskan oleh variabel lain.

Untuk model *Random Effect* variabel PAD dan DANA PERIMBANGAN berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Dilihat dari nilai probabilitas F-statistik menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel PAD, DANA PERIMBANGAN, dan POPULASI berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengeluaran pemerintah. Dan untuk nilai *R-squared* didapatkan sebesar 86.44 persen yang berarti bahwa ada perubahan pada variabel pengeluaran pemerintah yang dapat dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel PAD, DANA PERIMBANGAN, dan POPULASI selebihnya dijelaskan oleh variabel lain.

#### **Hasil Koefisien Determinasi *Fixed Effect***

<b>R-squared</b>	<b>0.904360</b>
Adjusted R-Squared	0.883732
S.E of regression	0.168971
F-statistic	43.84097
Prob (F-statistic)	0.000000

Koefisien determinasi merupakan koefisien untuk mengukur seberapa besar perubahan variabel dependen jumlah pengeluaran pemerintah yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen PAD, DANA PERIMBANGAN, dan POPULASI. Dari hasil regresi *fixed effect* pada tabel 4.7 nilai koefisien determinasi atau  $R^2$  adalah 0.904360 atau 90.43% yang artinya sebesar 90.43% ada perubahan pada variabel pengeluaran yang dapat dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel PAD, DANA PERIMBANGAN, dan POPULASI selebihnya dijelaskan oleh variabel lain.

**Hasil Uji F dari estimasi *Fixed Effect***

R-squared	0.904360
Adjusted R-Squared	0.883732
S.E of regression	0.168971
<b>F-statistic</b>	<b>43.84097</b>
<b>Prob (F-statistic)</b>	<b>0.000000</b>

Uji f-statistik ini dilakukan untuk melihat signifikansi variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai F-statistik yang terdapat pada tabel 4.6 adalah 43.84097 dan untuk nilai probabilitasnya sebesar  $0.000000 < \alpha 1\%$  yang artinya secara bersama-sama variabel PAD, DANA PERIMBANGAN, dan POPULASI berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengeluaran yang terjadi di kabupaten / kota Kal-tim.

**Analisis Persamaan Koefisien dan Itersep Pembeda per provinsi di Kabupaten / Kota Kal-tim**

Tabel perbedaan koefisien antar Provinsi Kalimantan Timur :

Provinsi	Koefisien C	Koefisien per Kabupaten / Kota	Intersep Kabupaten / Kota
_BERAU	3.366613	-0.058360	3.308253
_KUKAR	3.366613	0.231280	3.597893
_KUBAR	3.366613	0.039494	3.406107
_KUTIM	3.366613	0.285619	3.652232
_PASER	3.366613	0.022795	3.389408
_BALIKPAPAN	3.366613	-0.250607	3.116006
_BONTANG	3.366613	-0.135945	3.230668
_SAMARINDA	3.366613	-0.189926	3.176687
_PENAJAM	3.366613	0.055650	3.422263

Intersep yang dimiliki masing-masing *cross section* diyakini bahwa pada setiap kabupaten / kota pada penelitian ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam pengimplementasian variabel bebas dalam peran meningkatkan Pengeluaran Pemerintah. Seperti pada di Tabel dijelaskan bahwa setelah penjumlahan antara inteseop dan koefisien diketahui bahwa terdapat tiga daerah kabupaten / kota yang memiliki hasil yang paling tinggi yaitu pada Kabupaten Kutim 3.652232, Kabupaten Kukar sebesar 3.597893 dan Kabupaten Penajam sebesar 3.422263. bahwa dari ketiga Kabupaten tersebut dapat diasumsikan semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah. Sedangkan pada Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang adalah tiga terendah kabupaten yang memiliki konstanta paling rendah yaitu sebesar 3.116006 pada Kota Balikpapan, 3.176687 Kota Samarinda, dan 3.230668 Kota Bontang. Kota tersebut diasumsikan semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah kabupaten / kota lain di Provinsi Kal-tim.

### **Analisis pengaruh PAD terhadap Pengeluaran**

Hasil penelitian dalam *Fixed Effect Models* pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas PAD sebesar  $0.0000 < \alpha 1\%$ , yang artinya bahwa secara statistik PAD berpengaruh signifikan terhadap total pengeluaran pemerintah. Sedangkan untuk nilai koefisien PAD sebesar 0.358968% yang berarti bahwa ketika PAD naik 1% maka total pengeluaran pemerintah di kabupaten / kota Provinsi Kal-tim akan mengalami kenaikan sebesar 0.358968%. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien PAD sesuai dengan dugaan hipotesis yang mengatakan bahwa PAD akan berpengaruh positif terhadap total pengeluaran pemerintah kabupaten / kota di Kal-tim. Hal tersebut dapat terjadi ketika peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas di sektor publik akan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi akan membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

### **Analisis pengaruh DANA PERIMBANGAN terhadap Pengeluaran**

Hasil penelitian dalam *Fixed Effect Models* pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas DANA PERIMBANGAN sebesar  $0.0000 < \alpha 1\%$ , yang artinya bahwa secara statistik DANA PERIMBANGAN berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengeluaran pemerintah. Sedangkan untuk nilai koefisien DANA PERIMBANGAN sebesar 0.509972, yang berarti bahwa ketika DANA PERIMBANGAN naik 1% maka jumlah pengeluaran di kabupaten / kota di Provinsi Kal-tim akan mengalami kenaikan sebesar 0.509972 ini menunjukkan bahwa di setiap kabupaten / kota Kalimantan Timur masih mengharapkan sebagian besar pada dana perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa DANA PERIMBANGAN sesuai dengan hipotesis. Yaitu kabupaten / kota Kalimantan Timur masih mengharapkan sebagian besar pendanaan melalui dana perimbangan seperti dana alokasi umum dan dan alokasi khusus, selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ketika dana bantuan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah meningkat maka akan menyebabkan pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan. Sehingga akan mendorong berjalannya otonomi daerah di daerah tersebut.

### **Analisis pengaruh POPULASI terhadap Pengeluaran**

Hasil penelitian dalam *Fixed Effect Models* pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas POPULASI sebesar  $0.9322 > \alpha 1\%$ , yang artinya bahwa secara statistik POPULASI tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengeluaran. Sedangkan untuk nilai koefisien POPULASI sebesar -0.010866, yang berarti bahwa ketika POPULASI naik 1% maka jumlah pengeluaran di Kabupaten/Kota Provinsi Kal-tim akan mengalami penurunan sebesar -0.010866%.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa nilai koefisien POPULASI sesuai dengan dugaan hipotesis, ketika POPULASI naik maka akan menurunkan belanja langsung dan akan menaikkan kebutuhan barang publik, yang mengakibatkan pemerintah daerah harus meningkatkan dan menambah fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastuktur lainnya, sehingga nantinya akan mendorong kenaikan anggaran pada pengeluaran pemerintah.

### **Analisis *Flypaper Effect* pada Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur**

Analisis mengenai *Flypaper Effect* mengadung dua prinsip dasar yaitu :

1. Model yang menunjukkan bahwa daerah merespon bantuan dana transfer yang akan digunakan untuk mengukur demand pelayanan publik

2. Model median (rata-rata) merupakan model yang dipilih untuk melihat respon transfer per wilayah yang menerima bantuan dana transfer dari pemerintah, ketika pemerintah melihat ada indikasi bahwa dana yang diberikan harus habis untuk dibelanjakan, sehingga anggapan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan daerah mereka sendiri (Tresch, 2002). *Flypaper Effect* adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja daerah dengan lebih banyak mengandalkan atau menggunakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri dari DAU dan DAK dibandingkan dengan menggunakan kemampuan daerahnya sendiri yang berasal dari PAD (Maimunah, 2006).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat diketahui bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta Populasi mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah secara signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas F statistik yang lebih kecil  $\alpha = 1\%$  atau 0,10 berdasarkan hasil uji t stat, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah diketahui dari nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari tingkat kesalahan  $\alpha = 1\%$  atau 0,10 dan pada variabel Populasi tidak berpengaruh signifikan diketahui dari nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat kesalahan  $\alpha = 1\%$  atau 0,10.

Fenomena *flypaper effect* terjadi di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur, dilihat dari persentase PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja daerah / pengeluaran pemerintah kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur periode 2010-2016 menunjukkan bahwa persentase penggunaan antara PAD dan Dana Perimbangan sebagai sumber pendanaan bagi kabupaten/kota dilihat dari hasil regresi 1:9 yang artinya belanja daerah kabupaten/kota periode 2010-2016 masih didominasi oleh Dana Perimbangan. Dari fakta hasil regresi ini dapat dilihat bahwa terdapat indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan belanja daerah atau pengeluaran pemerintah dan terjadinya gejala *flypaper effect*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2016, menggunakan regresi data panel dengan variabel independennya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Populasi terhadap variabel dependen Pengeluaran Pemerintah :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sesuai dengan dugaan hipotesis bahwa PAD berpengaruh positif pada Pengeluaran Pemerintah. Diharapkan dengan berpengaruhnya PAD pada pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan sektor publik di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari  $\alpha$  1%.
2. Dana perimbangan bersifat positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa Dana Perimbangan sesuai dengan dugaan hipotesis bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif pada Pengeluaran Pemerintah. Dana Perimbangan diharapkan dapat meningkatkan sektor publik kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan pembangunan dan fasilitas pelayanan publik. Dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 yang lebih dari  $\alpha$  1%.
3. Populasi bersifat negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah. Hal ini membuktikan jika populasi atau jumlah penduduk naik maka akan menaikkan pengeluaran pemerintah, karena semakin meningkatnya jumlah populasi akan menyebabkan pemerintah untuk meningkatkan fasilitas dan sarana prasana di sektor publik yang menyebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah.
4. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa *flypaper effect* masih terjadi di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010-2016. Hal ini dibuktikan dengan koefisien Dana Perimbangan lebih besar daripada koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 0.358968 dan 0.509972. hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kalimantan Timur masih bergantung pada tranfer pemerintah pusat dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan daerahnya.



## SARAN

Dari hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan implikasi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah diharapkan terus memberikan kontribusi yang besar kepada pendanaan Pemerintah daerah dami meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam memfasilitasi sektor publik yaitu kebutuhan publik, fasilitas pelayanan dan infrastruktur.
2. Pemerintah daerah diharapkan meminimalisir kebutuhan belanja pegawai, tunjangan pegawai, biaya perjalanan pegawai dan alokasi pengeluaran pemerintah daerah yang kurang efektif lainnya.
3. Untuk meningkatkan Pengeluaran Pemerintah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah nya melalui pajak dan retribusi lainnya, untuk meningkatkan pendapatannya.
4. Dana Perimbangan yaitu DBH, DAU, dan DAK diharapkan digunakan efektif sesuai dengan pos – pos yang telah dianggarkan pemerintah pusat untuk digunakan sesuai sasaran dan target.
5. Diharapkan pada pemerintah lebih transparan kepada masyarakat dalam menggunakan belanja langsung dan lebih produktif dalam menggunakan dana yang tersedia.
6. Dan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Populasi untuk dijadikan bahan penelitian hendaknya *update* periode lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim, (2003) “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*”. Simposium Nasional Akutansi VI, Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. (2010). “*Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu, Yogyakarta*.”
- Alodia, Moristha. (2016). “*Analisis Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*”. Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi.
- Armawaddin Muhammad. (2015). “*Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tenggara*”. Vol.XVI Hal 13-19.
- Badan Pusat Statistik. Kalimantan Timur. <https://kaltim.bps.go.id>
- Devita, Andri: Delis, Arman: Junaidi. (2014). “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*”. Skripsi. Universitas Jambi, Jambi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 2 Hal. 64-65
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul. (2008). “*Analisis Investasi ( Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah, UPP STIM YKPN*”, Yogyakarta.
- Hartanto, Eko. (2015). “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2007-2011*” . Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi.
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Penerimaan Daerah.

Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Maimunnah, Mutiara. (2006). *“flypaper effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Skripsi. STIE MUSI, Palembang.

Mankiw, N. Gregory. (2007). *Makro Ekonomi*, Edisi ke-6, Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. (2002). *“Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Purpitasri, Puput. (2015). *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah”* . STIESIA, Surabaya. Vol 4 No 11 Jurnal Ilmu & Riset Akutansi.

Putriani, S. (2011). *“Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah*. Universitas Brawijaya, Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Tresch, Richard.(2002). *”Finance Public Anormative Theory”*. Departement of Economic, Boston Collage Chestnut Hill, Massachusetts.

Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika Teori Dan Aplikasi, Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta, Ekonesia.

Widarjono, Agus. (2016). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.